EZRA SCIENCE BULLETIN
E-ISSN 2988-1897| DOI prefix 10.58526 | https://ezra.krabulletin.com
Ezra Science Bulletin is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Implementasi Satu Data Indonesia Dalam Mendukung Governansi Digital: Studi Literatur Tentang Integrasi Dan Interoperabilitas Data Pemerintah

Cindy Dwi Ariani, Dwi Azzahra, Atrika Iriani, Ade Maulidya
Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Artikel info

Corresponding Author:

Cindy Dwi Ariani
cindydwiariani9@gmail.com
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Transformasi digital pemerintahan membutuhkan tata kelola data yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas data pemerintah sebagai bagian dari governansi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) dan teknik sintesis tematik terhadap sepuluh artikel jurnal yang relevan dan diterbitkan pada periode 2019–2026. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi interoperabilitas, yaitu hukum, organisasi, semantik, dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI masih menghadapi hambatan berupa ketidaksinkronan regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum seragamnya standar data dan metadata, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penguatan keempat dimensi interoperabilitas diperlukan untuk mewujudkan governansi digital yang terintegrasi dan berbasis data.

Keywords: *Satu Data Indonesia, Governansi Digital, Integrasi Data, Interoperabilitas Data, Tata Kelola Data Pemerintah*

This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan informasi, pengambilan keputusan, dan penyediaan pelayanan publik. Transformasi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi, tetapi juga membangun tata kelola yang memungkinkan data digunakan secara terpadu oleh berbagai instansi. Dalam perspektif governansi digital, pemanfaatan teknologi berkaitan erat dengan perubahan proses organisasi, koordinasi kelembagaan, serta hubungan pemerintah dengan pemangku kepentingan. Janowski (2015) menjelaskan bahwa perkembangan pemerintahan digital berlangsung melalui empat tahapan, yaitu digitization, transformation, engagement, dan contextualization. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan digital tidak hanya

bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyesuaikan proses dan tata kelola dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, upaya mewujudkan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi dilakukan melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan menghasilkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi. Pelaksanaannya didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu pemenuhan standar data, penggunaan metadata, interoperabilitas data, serta penerapan kode referensi dan/atau data induk. Melalui prinsip tersebut, SDI diharapkan dapat mengurangi fragmentasi pengelolaan data dan mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Meskipun demikian, implementasi SDI masih menghadapi berbagai persoalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pemerintah. Islami (2021) mengidentifikasi bahwa tantangan penyelenggaraan SDI muncul pada tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan kebijakan belum sepenuhnya menjamin terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi antarlembaga pemerintah.

Salah satu persoalan penting dalam implementasi SDI adalah kemampuan instansi pemerintah untuk mengintegrasikan dan mempertukarkan data melalui sistem yang berbeda. Integrasi data berkaitan dengan keterpaduan pengelolaan dan pemanfaatan informasi lintas instansi, sedangkan interoperabilitas menunjukkan kemampuan sistem dan organisasi untuk saling bertukar serta menggunakan data secara konsisten. Permasalahan interoperabilitas tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh perbedaan aturan, struktur organisasi, standar, dan pemaknaan data. Fajar (2023), melalui kajiannya terhadap Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), menemukan bahwa pengembangan interoperabilitas dalam mendukung SDI menghadapi kendala pada empat dimensi, yaitu hukum, organisasi, semantik, dan teknis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa interoperabilitas memerlukan keselarasan antara pengaturan kelembagaan dan kesiapan sistem informasi agar pertukaran data dapat dilaksanakan secara efektif.

Tantangan pelaksanaan SDI juga terlihat pada tingkat pemerintahan daerah yang memiliki kondisi kelembagaan dan kapasitas pengelolaan data yang beragam. Zannuba et al., (2024), dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya komitmen dan keberlanjutan pemerintah daerah dalam mengembangkan penyelenggaraan SDI. Temuan ini menggambarkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga memerlukan dukungan organisasi pelaksana serta kesinambungan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa data yang dikelola oleh masing-masing organisasi dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung kebutuhan pemerintahan.

Permasalahan serupa ditemukan dalam penerapan layanan interoperabilitas data pada pemerintah daerah. Hapsari & Permana (2025)melalui penelitian pada Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan layanan interoperabilitas melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknis sumber daya manusia, belum konsistennya standar pertukaran data, rendahnya komitmen antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur digital perlu disertai penguatan koordinasi kelembagaan, dukungan regulasi, dan peningkatan kompetensi pengelola data. Dengan demikian, integrasi dan interoperabilitas data pemerintah merupakan persoalan tata kelola yang membutuhkan keterpaduan aspek teknis maupun nonteknis dalam mendukung penyelenggaraan governansi digital.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai tantangan implementasi SDI, baik dalam penyelenggaraan kebijakan secara umum, pengembangan interoperabilitas sistem informasi, maupun pelaksanaannya pada pemerintah daerah. Namun, kajian tersebut memiliki perbedaan fokus, konteks, dan pendekatan analisis sehingga diperlukan sintesis yang menghubungkan berbagai temuan secara lebih terpadu. Celah penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan hubungan antara implementasi kebijakan SDI, integrasi data, dan interoperabilitas pemerintah melalui perspektif perkembangan governansi digital. Secara khusus, penelitian ini menghubungkan empat dimensi interoperabilitas, yaitu hukum, organisasi, semantik, dan teknis, dengan kebutuhan perubahan tata kelola pemerintahan digital. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hambatan dan faktor pendukung pertukaran data lintas instansi tanpa mengabaikan perbedaan konteks dari setiap penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Satu Data Indonesia dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas data pemerintah sebagai bagian dari governansi digital di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang menelaah pengaturan kelembagaan, penerapan standar data, hambatan pertukaran data, serta upaya perbaikan berdasarkan temuan penelitian terdahulu. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa sintesis literatur yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan SDI, integrasi data, dan interoperabilitas dalam perkembangan governansi digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, menyelaraskan standar dan metadata, serta mengembangkan mekanisme pertukaran data yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) dan teknik sintesis tematik untuk menganalisis implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas data pemerintah. Snyder (2019) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengintegrasikan temuan penelitian terdahulu dan mengembangkan pemahaman terhadap suatu bidang kajian. Sumber data penelitian berupa artikel jurnal ilmiah yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Literatur implementasi dibatasi pada publikasi tahun 2019-

2026, sedangkan sumber sebelum periode tersebut digunakan sebagai landasan konseptual dan metodologis. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, SINTA, dan portal penerbit jurnal menggunakan kata kunci “Satu Data Indonesia”, “implementasi Satu Data Indonesia”, “integrasi data pemerintah”, dan “interoperabilitas data pemerintah”. Artikel dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kejelasan identitas publikasi, dan ketersediaan teks lengkap. Berdasarkan hasil seleksi, sepuluh artikel jurnal yang memenuhi kriteria digunakan sebagai sumber utama analisis. Instrumen penelitian berupa lembar ekstraksi literatur untuk mencatat identitas, metode, konteks, dan temuan utama setiap artikel.

Data dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik dengan mengadaptasi enam tahapan analisis Braun & Clarke (2006) , yaitu pengenalan data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan. Sintesis dilakukan dengan membandingkan serta menghubungkan temuan antarartikel berdasarkan empat dimensi interoperabilitas, yaitu hukum, organisasi, semantik, dan teknis. Hasil pengelompokan kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan hambatan, faktor pendukung, serta keterkaitan implementasi SDI dengan perkembangan governansi digital. Keabsahan hasil dijaga melalui pemeriksaan kredibilitas sumber, perbandingan temuan antarartikel, dan dokumentasi proses analisis.Nowell et al., (2017) menjelaskan bahwa analisis tematik yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan terdokumentasi dapat meningkatkan keterpercayaan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai implementasi Satu Data Indonesia (SDI), diperoleh sepuluh artikel jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Artikel tersebut membahas implementasi kebijakan SDI pada tingkat nasional maupun daerah, integrasi dan interoperabilitas data, koordinasi kelembagaan, serta pemanfaatan data dalam mendukung pemerintahan berbasis digital. Hasil penelaahan terhadap tujuan dan temuan masing-masing penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Literatur Mengenai Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Governansi Digital

No	Judul Artikel	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia	Ardani & Cahyani (2022)	Mengkaji tantangan implementasi SDI dalam sistem pencatatan kematian dan penyebab kematian di Provinsi DKI Jakarta.	Ditemukan tumpang tindih sistem pencatatan dan pelaporan antarinstansi. Lemahnya koordinasi dan ego sektoral memengaruhi kualitas data serta menghambat

				integrasi informasi pemerintah.
2	*Analysis of Satu Data Indonesia Policy Implementation: The Role of BPS-Statistics Indonesia as a Statistical Data Coach*	Amelia & Rahayu (2023)	Menganalisis implementasi SDI dan peran BPS sebagai pembina data statistik.	Implementasi SDI belum berjalan optimal. Peran BPS dalam membina instansi dan pemerintah daerah untuk mengelola data statistik juga belum maksimal.
3	Proses Kolaborasi Kebijakan Satu Data Salatiga dalam Menyediakan Informasi Publik di Kota Salatiga	Anisa et al., (2023)	Menganalisis proses kolaborasi kebijakan Satu Data Salatiga dalam penyediaan informasi publik.	Kolaborasi melibatkan produsen data dan Diskominfo sebagai walidata. Hambatan meliputi keterbatasan sumber daya, komunikasi internal, dan belum optimalnya peran forum.
4	*The Unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation: A Lesson Learned from Local Government*	Firmansyah & Susanto (2023)	Mengidentifikasi permasalahan dan strategi implementasi SDI di Kabupaten Madiun.	Ditemukan skor kesiapan SDI sebesar 45,60% dan 24 permasalahan pada delapan aspek tata kelola. Strategi perbaikan mencakup penguatan kebijakan, infrastruktur, SDM, anggaran, dan kolaborasi.
5	Efektivitas Program Bali Satu Data dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali	Aprilia et al., (2024)	Menganalisis efektivitas program Bali Satu Data dalam mendukung keterbukaan informasi publik.	Program berjalan cukup optimal dalam ketepatan sasaran dan pemantauan. Namun, sosialisasi, pembaruan data, kesesuaian format, dan penerapan SOP masih menghadapi kendala.
6	Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis	Adinegoro et al., (2025)	Mengkaji kebijakan SDI dalam kaitannya	Pengelolaan data yang tumpang tindih berpotensi

	Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik		dengan keterbukaan informasi, interoperabilitas, dan transformasi governansi publik.	meningkatkan beban anggaran dan menyulitkan interoperabilitas serta mekanisme berbagi pakai data.
7	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nuryana & Junaidi (2025)	Menganalisis implementasi kebijakan SDI pada Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Implementasi menunjukkan hasil cukup baik, tetapi masih terkendala keterbatasan tenaga ahli statistik, anggaran, komunikasi antar-OPD, keterlambatan pengumpulan, dan ketidaksesuaian data dengan prinsip SDI.
8	Pengelolaan Penerapan Satu Data Indonesia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	Agusta & Putra (2025)	Mengkaji penguatan penerapan SDI melalui SOP, standardisasi sistem, dan pembekalan pengelola data.	Penguatan dilakukan melalui workshop, penyusunan SOP, dan pembekalan pengumpulan data. Kelengkapan data dan pelatihan berkelanjutan masih diperlukan karena keterbatasan serta pergantian SDM.
9	*Strategy for Optimizing Sectoral Data Governance in Central Java in the Realization of One Data*	Widyastuti (2026)	Mengidentifikasi permasalahan tata kelola data sektoral di Jawa Tengah dan merumuskan strategi optimalisasi SDI.	Indeks SDI Jawa Tengah tahun 2024 mencapai 66,44 dengan predikat cukup. Hambatan meliputi mekanisme berbagi data, integrasi sistem, keterbatasan tenaga IT, dan pemahaman tata kelola data.
10	Implementasi Kebijakan Portal Satu Data Sekadau pada Dinas Komunikasi dan	Rayadin et al., (2026)	Menganalisis implementasi portal Satu Data Sekadau dan faktor	mplementasi masih menghadapi keterbatasan kualitas SDM, anggaran, koordinasi internal,

Informatika Kabupaten Sekadau	yang memengaruhi pelaksanaannya.	sosialisasi, pelatihan, serta belum memadainya SOP dan sistem birokrasi pengelolaan data.

PEMBAHASAN.

Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, koordinasi antarinstansi, standardisasi, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan SDI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan portal data, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola serta mempertukarkan informasi secara terpadu. Ardani & Cahyani (2022) serta Firmansyah & Susanto (2023) sama-sama menunjukkan bahwa fragmentasi data, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan kesiapan kelembagaan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan SDI. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan data pemerintah masih membutuhkan penguatan koordinasi dan komitmen antarorganisasi agar prinsip keterpaduan dapat diwujudkan.

Dari dimensi organisasi, penelitian Amelia & Rahayu (2023), Anisa et al., (2023), serta Nuryana & Junaidi (2025) memperlihatkan bahwa keberhasilan SDI dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, dan pembagian tanggung jawab antarinstansi. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada konteks pemerintahan yang berbeda, ketiganya menunjukkan pentingnya peran pembina data, walidata, dan produsen data dalam mendukung keberlanjutan kebijakan. Perbedaan kondisi pada setiap daerah juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan nasional membutuhkan dukungan kelembagaan yang disesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan Forum Satu Data, peningkatan kompetensi pengelola data, serta kejelasan pembagian kewenangan menjadi bagian penting dalam mendukung governansi digital.

Pada dimensi semantik dan teknis, penelitian Aprilia et al., (2024), Agusta & Putra (2025), serta Widyastuti (2026) menunjukkan bahwa standardisasi data, metadata, prosedur pengumpulan, dan kesiapan infrastruktur masih menjadi perhatian dalam implementasi SDI. Ketidaksesuaian format data, keterbatasan sistem integrasi, serta belum optimalnya penerapan SOP dapat menghambat proses pertukaran informasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa interoperabilitas tidak cukup diwujudkan melalui keterhubungan antarsistem, tetapi juga membutuhkan keseragaman struktur dan makna data yang dipertukarkan. Dengan demikian, pemerintah perlu memperkuat standardisasi data sekaligus meningkatkan kesiapan infrastruktur dan kemampuan teknis pengelola data.

Sementara itu, Adinegoro et al., (2025) dan Rayadin et al., (2026) memperlihatkan bahwa pengembangan tata kelola data juga berkaitan dengan persoalan efisiensi kelembagaan, anggaran, dan sistem birokrasi. Pengelolaan data yang tumpang tindih dapat meningkatkan beban organisasi dan menyulitkan proses berbagi pakai informasi. Di sisi lain, keterbatasan anggaran, tenaga pengelola, serta belum memadainya prosedur operasional dapat menghambat keberlanjutan portal data pemerintah.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi SDI tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai permasalahan tata kelola yang melibatkan aspek kebijakan, organisasi, semantik, dan teknologi secara bersamaan.

Perbedaan temuan antarpenelitian dapat dipengaruhi oleh karakteristik dan kesiapan masing-masing pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, infrastruktur teknologi, serta komitmen kelembagaan menyebabkan tingkat pelaksanaan integrasi dan interoperabilitas data tidak selalu menunjukkan kondisi yang sama. Pemerintah daerah yang memiliki dukungan infrastruktur dan koordinasi kelembagaan lebih baik cenderung memiliki kesiapan yang lebih memadai dalam mengelola pertukaran data, sedangkan daerah dengan keterbatasan sumber daya masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar pengelolaan data. Dengan demikian, variasi hasil penelitian lebih mencerminkan perbedaan kondisi implementasi kebijakan daripada pertentangan terhadap tujuan utama Satu Data Indonesia.

Secara keseluruhan, sintesis sepuluh penelitian menunjukkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia membutuhkan keterpaduan empat dimensi interoperabilitas, yaitu hukum, organisasi, semantik, dan teknis. Dimensi hukum berkaitan dengan kepastian regulasi dan kewenangan berbagi data; dimensi organisasi mencakup koordinasi dan kapasitas kelembagaan; dimensi semantik berhubungan dengan keseragaman standar dan metadata; sedangkan dimensi teknis mencakup infrastruktur serta kemampuan sistem dalam mempertukarkan informasi. Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dalam mendukung perubahan tata kelola pemerintahan menuju governansi digital berbasis data.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi melalui sintesis temuan lintas wilayah dan konteks penyelenggaraan SDI untuk menjelaskan hubungan antara integrasi data, interoperabilitas, dan governansi digital. Sementara itu, secara praktis, hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi produsen data dan walidata, menyelaraskan standar serta metadata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan mekanisme pertukaran data yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan sumber sekunder dan tidak melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan SDI pada instansi pemerintah. Perbedaan lokasi, metode, dan periode penelitian terdahulu juga membatasi generalisasi hasil sintesis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi kasus komparatif pada beberapa pemerintah daerah untuk mengkaji kesiapan interoperabilitas serta pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) memiliki peran penting dalam mendukung governansi digital melalui penguatan integrasi dan interoperabilitas data pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi ketidaksinkronan regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum seragamnya standar serta metadata, dan

keterbatasan infrastruktur teknologi. Hasil sintesis sepuluh penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDI memerlukan keterpaduan empat dimensi interoperabilitas, yaitu hukum, organisasi, semantik, dan teknis. Keempat dimensi tersebut perlu diperkuat secara bersamaan agar pertukaran dan pemanfaatan data antarlembaga dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, optimalisasi SDI tidak cukup hanya melalui pengembangan sistem informasi, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola data, harmonisasi standar, serta komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola berbasis data. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya governansi digital yang lebih terintegrasi, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan publik secara lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, *16*(01), 1–11. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869

Agusta, Y., & Putra, I. M. A. W. (2025). Pengelolaan penerapan Satu Data Indonesia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer, 8(1), 73–78.

Amelia, R., & Rahayu, S. Y. R. (2023). ANALYSIS OF SATU DATA INDONESIA POLICY IMPLEMENTATION: THE ROLE OF BPS-STATISTICS INDONESIA AS A STATISTICAL DATA COACH. *Jurnal UDA*, *31*(1), 708–719. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/3115

Anisa, Z. L. N., Sunu, R., & Zarkasyi, A. (2023). PROSES KOLABORASI KEBIJAKAN SATU DATA SALATIGA DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA SALATIGA. *Journal of Management and Public Policy*, *12*(3), 896–913. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/40042

Aprilia, E., Prabawati, N. P. A., & Lukman, J. P. (2024). Efektivitas Program Bali Satu Data Dalam Upaya Keterbukaan Informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *1*(2), 78–87. https://doi.org/10.61292/shkr.110

Ardani, I. G. A. K., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan kebijakan Satu Data Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 25(1), 52–60.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Fajar, M. N. (2023). TANTANGAN TATA KELOLA INTEROPERABILITAS DALAM SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PROGRAM SATU DATA INDONESIA. *Jurnal Analis Kebijakan*, *7*(1), 48–68. https://doi.org/10.37145/yvrf2p49

Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. *Jurnal Mantik*, *7*(1), 2685–4236. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3564433

Hapsari, A., & Permana, I. (2025). The Implementation of Data Interoperability Services in the Government of West Sumatra Province. *The Future of Education Journal*, *4*(7), Page. https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/article/view/909

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan critical success factors (CSFs). Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 10(1), 13–23.

Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, *32*(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, *16*(1). https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 356–383. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266

Rayadin, A., Rochmawati, I., & Pardi. (2026). Implementasi kebijakan Portal Satu Data Sekadau pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 5(1), 561–572. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6548514

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Widyastuti, A. (2026). Strategy for Optimizing Sectoral Data Governance in Central Java in the Realization of One Data. *Jurnal Pembangunan Daerah*, *2*(1), 83–101. https://doi.org/10.36762/jpd.v2i1.1335

Zannuba, L. A., Satyawan, D. S., & Wijaya, S. S. (2024). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. *Public Policy and Management Inquiry*, *8*(1), 38. https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11939